



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hendrar Prihadi

Jabatan : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025
Kepala Lembaga Kebijakan
Barang/Jasa Pemerintah

Hendrar Prihadi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan Target	Target
1	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional	1.1	Indeks Kinerja Pengadaan	Indeks	50.77
2	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2.1	Indeks penerapan tata kelola pengadaan	Indeks	54.62
3	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	3.1	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	A

Prioritas Nasional		Indikator		Satuan Target	Target
1	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.1	Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	Rancangan Peraturan	1
		1.2	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	Produk	2
		1.3	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa	Lembaga	2

Prioritas Nasional		Indikator		Satuan Target	Target
			pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ Berkelanjutan		
2	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	2.1	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	UMKM	500
		2.2	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	UMKM	500
3	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3.1	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga Internasional	Kegiatan	2
		3.2	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Orang	200

Prioritas Nasional		Indikator		Satuan Target	Target
4	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4.1	Desa Yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	Desa	5
		4.2	UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level-3	Lembaga	35
		4.3	SDM PBJ dan non-JF PBJ	Orang	550
		4.4	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	Modul Aplikasi	1

PROGRAM

1. Program Dukungan Manajemen
 2. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional
- Total Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025

ANGGARAN

Rp122.094.968.000
Rp 37.269.091.000
Rp159.364.059.000

Jakarta, Januari 2025
Kepala Lembaga Kebijakan
Barang/Jasa Pemerintah

Hendrar Prihadi

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sarah Sadiqa

Jabatan : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, September 2025

Kepala Lembaga Kebijakan
Barang/Jasa Pemerintah

Sarah Sadiqa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Satuan Target	Target
1	Meningkatnya kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah untuk mendukung pembangunan nasional	1.1	Indeks Kinerja Pengadaan	Indeks	49.88
2	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola pengadaan	2.1	Indeks penerapan tata kelola pengadaan	Indeks	59.96
3	Meningkatnya kualitas penerapan tata kelola internal LKPP	3.1	Nilai Reformasi Birokrasi	Predikat	A

Prioritas Nasional		Indikator		Satuan Target	Target
1	Asta Cita 2 : Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1.1	Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	Rancangan Peraturan	1
		1.2	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	Produk	2
		1.3	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	Lembaga	2

Prioritas Nasional		Indikator		Satuan Target	Target
			Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga Internasional	Kegiatan	2
2	Asta Cita 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	2.1	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	UMKM	500
		2.2	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	UMKM	500
3	Asta Cita 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	3.1	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Orang	200
4	Asta Cita 7: Memperkuat Reformasi	4.1	Desa yang memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	Desa	5

Prioritas Nasional		Indikator		Satuan Target	Target
	Politik, Hukum, dan Birokrasi serta memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan	4.2	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	Modul Aplikasi	1
		4.3	SDM PBJ dan non-JF PBJ	Orang	550
		4.4	UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level-3	Lembaga	35
		4.5	Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ	Orang	200
		4.6	K/L/Pemda yang terbangun Kapabilitas untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	K/L/Pemda	2

PROGRAM

1. Program Dukungan Manajemen

Pagu Efisiensi

Pagu Tersedia

ANGGARAN

Rp129.442.903.000

Rp 13.451.810.000

Rp115.991.093.000

2. Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Pagu Efisiensi

Pagu Tersedia

Rp 37.269.091.000

Rp 20.371.469.000

Rp 16.897.622.000

Total Anggaran Lembaga Kebijakan Pengadaan

Rp166.711.994.000

Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025

Jakarta, September 2025

Kepala Lembaga Kebijakan

Barang/Jasa Pemerintah



Sarah Sadiqa

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharti

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hendrar Prihadi

Jabatan : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Hendrar Prihadi



Suharti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan Target	Target
Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ	1.1	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	K/L/Pemda	240
	1.2	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	K/L/Pemda	422

Program : Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp7.247.289.000

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya Rp7.247.289.000

Jakarta, Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Hendrar Prihadi

Suharti

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suharti

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sarah Sadiqa

Jabatan : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Sarah Sadiqa

Suharti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Program	Indikator Kinerja		Satuan Target	Target
Meningkatnya kualitas SDM dan kelembagaan PBJ	1.1	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki SDM PBJ yang kompeten	K/L/Pemda	276
	1.2	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	K/L/Pemda	480

Program : Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp11.016.071.000

Kegiatan

Anggaran

Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya Rp 11.016.071.000

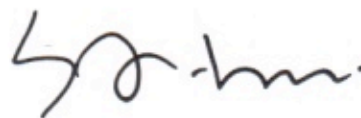
Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Sarah Sadiqa



Suharti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hermawan

Jabatan : Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suharti

Jabatan : Deputy Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Suharti



Hermawan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan Target	Target
1	Terwujudnya SDM PBJ Yang Kompeten	1.1	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	Orang	10.000
		1.2	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	Orang	1.675
		1.3	Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	Orang	10
2	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ	2.1	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	UKPBJ	422
		2.2	Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif	UKPBJ	1

Kegiatan

Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya

Anggaran

Rp3.539.260.000

Jakarta, 21 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Suharti



Hermawan

**LKPP**Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Wahyuni Kartianingsih

Jabatan : Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suharti

Jabatan : Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya
Manusia

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Suharti

Dwi Wahyuni Kartianingsih

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTUR PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Satuan Target	Target
1	Terwujudnya SDM PBJ Yang Kompeten	1.1	Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	Orang	10.570
		1.2	Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	Orang	1.675
		1.3	Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	Orang	10
2	Meningkatnya Kapabilitas UKPBJ	2.1	Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	UKPBJ	480
		2.2	Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan - Proaktif	UKPBJ	1

Kegiatan

Pengelolaan Pengembangan SDM PBJ dan Kelembagaannya

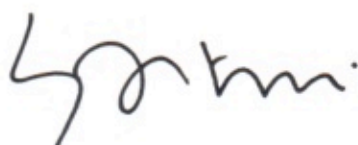
Anggaran

Rp3.539.260.000

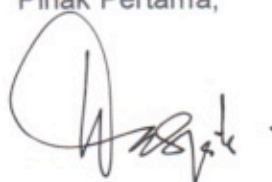
Jakarta, Oktober 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Suharti



Dwi Wahyuni Kartianingsih